

DIK RUTIN



LAPORAN KEGIATAN

**PENGARUH PERAN FUNGSI PEMERIKSAAN INTERN
TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMDA KOTA SEMARANG**

Oleh

Tri Jatmiko, SE, Msi, Akt
Drs. Abdul Rohman, MSi, Akt
Warsito, SE, Msi, Akt

Dibiayai dengan dana DIPA Universitas Diponegoro Nomor:061.0/23-4.0/XIII/2005
Kode5584-0036 MAK 521114, sesuai dengan Perjanjian Tugas Pelaksanaan
Penelitian Para Dosen Universitas Diponegoro, Nomor: 07A/J07.11/PG/2005,
tanggal 10 Mei 2005

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
BULAN OKTOBER, TAHUN 2005

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 246/KI/PE/01

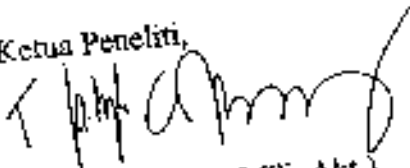
Tgl. 28-4-06

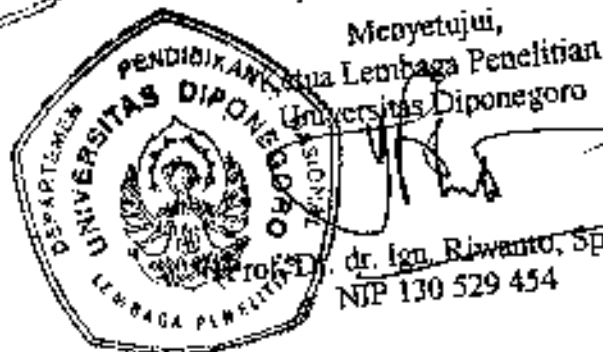
**IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DIK RUTIN**

1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Peran Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemda Kota Semarang.
b. Bidang ilmu : Ilmu Ekonomi/Akuntansi
c. Katagori Penelitian : Meningkatkan Ketrampilan Staf Pengajar
2. Ketua Peneliti:
a. Nama : Tri Jatniko, SE, MSi, Akt.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Golongan/NIP : 01 B/132 258 040
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
f. Bidang Ilmu : Ekonomi-Akuntansi
3. Jumlah Peneliti : 2(dua) orang
a. Nama : Drs. Abdul Rohman, MSi, Akt
b. Nama : Warsito Kawedar, SE, MSi, Akt
4. Lokasi Penelitian : Pemda Kota Semarang
5. Lama Penelitian : 6(enam) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah)

Semarang, 10 Oktober 2005

Ketua Peneliti,


(Tri Jatniko, SE, MSi, Akt.)
NIP 132 258 040



ABSTRACT

This research investigates the influence of the roles internal audit function on the efficiency of the local government financial management. Area research are local government of Semarang City.

This research is an analytic observation uses survey method and non experimentally. This research take sample with purposive sampling method. Analysis method used in this research is regretion method.

Based on the result of hypothesis test use regretion analysis with t-test showed that are significant effects the roles of internal audit function to the efficiency of the local government financial management

DAFTAR TABEL

- Table-1 : Operasionalisasi Variabel
Tabel-5.1 : Uji Hipotesis

DAFTAR GAMBAR

Gambar – 1 : Kerangka Konseptual Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran : Kuesioner
- Lampiran : Hasil Perhitungan validitas dan reliabilitas
- Lampiran : Data Ordinal
- Lampiran : Successive Variabel X
- Lampiran : Data Variabel X
- Lampiran : Successive Variabel Y
- Lampiran : Data Variabel Y
- Lampiran : Hasil Perhitungan Regresi
- Lampiran : Personalia Tim Penelitian

I PENDAHULUAN

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemda dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomis yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah Atasan) menjadi akuntabilitas horisontal (kepada masyarakat di daerah). Perubahan ini menuntut mekanisme akuntabilitas dari manajemen Pemda kepada masyarakat di daerah selaku pemberi mandat yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Mardiasmo, 1999).

Akuntabilitas pada dasarnya mencakup pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Pemda dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomis (LAN, 2000). Kinerja Pemda dalam hal ini dinilai berdasarkan kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat (Ditjen Otda, 2002).

Pengelolaan sumber-sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah menurut PP. 105/2000 dan Kepmendagri No.29/2002 mencakup aktivitas; penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah" yang dijabarkan dengan

Keppmendagri No.29 Tahun 2002 tentang "Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", dan lahirnya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang "Keuangan Negara", serta Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang "Perbendaharaan Negara" maka peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan administrasi keuangan daerah selama ini tidak berlaku lagi. Sistem administrasi keuangan pemerintah yang diterapkan selama ini kurang memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya, dan mudah dimengerti (Ditjen Otda, 2002).

Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien merupakan tuntutan setiap Pemda untuk dapat mencapai kinerja yang optimal dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomis daerah. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kemampuan Pemda dalam melaksanakan mekanisme manajemen yang bertumpu pada dua dimensi penting, yaitu : perencanaan dan pengendalian. Penetapan anggaran daerah merupakan hasil mekanisme perencanaan keuangan daerah, sedang pelaksanaan dan pengawasan anggaran daerah merupakan hasil mekanisme pengendalian keuangan daerah (Abdul Halim, 2001). Kedua mekanisme tersebut harus selalu diupayakan agar dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan partisipasi aktif pejabat pengelola keuangan daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan berbagai aturan pelaksanaan yang mudah dipedomani dalam pengelolaan keuangan daerah.

Konsep-konsep baru yang diperkenalkan dalam peraturan-peraturan baru, secara konsepsi dan filosofi belum banyak dipahami oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah. Para pejabat pengelola keuangan daerah banyak yang mempunyai persepsi bahwa paket peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan standar akuntansi pemerintahan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkesan dibuat tergesa-gesa tidak ada koordinasi ditingkat pemerintah pusat dalam membuat dan menetapkan peraturan pelaksanaan pada tingkat operasional yang lebih rendah.

Masing-masing pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai persepsi yang berbeda-beda atas penerapan peraturan-peraturan baru dan kebijakan akuntansi pemerintah. Sementara ada yang merasakan bahwa perubahan tersebut akan menimbulkan ancaman terhadap rasa aman, bahkan dapat mengancam kelangsungan kedudukannya.

Sumberdaya manusia di daerah pada umumnya belum siap dan kurang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang reformasi pengelolaan keuangan daerah (Ditjen Otda, 2002). Mereka sudah merasa enak dan enjoy dengan sistem lama yang selama ini dijalankan, walaupun landasan filosofinya kurang dipahami. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijalankan sudah melekat dalam tugas dan tanggungjawab setiap pengelola keuangan daerah di setiap unit kerja.

Di sisi lain, untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya peningkatan peran fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah di lingkungan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern (*internal auditing*) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk

menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boynton, 2001; ICAA, 1994, dan Jones, 1990).

Selama ini ada anggapan bahwa aparat pemeriksa fungsional merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus KKN di Indonesia (Gandi, 2000). Pemerintah daerah merasa terlalu banyak audit yang dilakukan yang merupakan tumpang tindih audit finansial yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional intern maupun ekstern. Tumpang tindih tersebut telah berjalan bertahun-tahun dan terus-menerus sehingga *auditee* lebih merasakannya sebagai beban daripada bantuan dalam pelaksanaan manajemen pemerintah. Disamping itu, aparat pemeriksa fungsional pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugasnya sering mengalami hambatan-hambatan misalnya adanya budaya ewuh pakewuh.

Berdasarkan uraian di muka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Peran Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei pada Pemda Kota Semarang)". Dipilihnya Pemda Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena Kota Semarang merupakan salah satu pemda yang telah menerapkan anggaran kinerja dan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut : Seberapa besar pengaruh peran fungsi pemeriksaan intern terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

II TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang mendasari penelitian adalah *Prospect Theory*. *Prospect Theory*, teori ini dipelopori oleh Kahneman dan Tversky (dalam Gudono, 1998). Secara garis besar teori ini mengatakan bahwa fungsi utilitas manusia dalam menghadapi pilihan yang menguntungkan berbentuk cembung, sedangkan dalam menghadapi pilihan yang